

NASKAH PUBLIKASI

**ANALISIS PENDEKATAN *BILATERAL CONSULTATIVE MECHANISM*
SEBAGAI JALAN DAMAI CHINA DALAM MEREDAM KONFLIK
DENGAN FILIPINA DI LAUT CHINA SELATAN**

***ANALYSIS OF BILATERAL CONSULTATIVE MECHANISM APPROACH
AS CHINA'S PEACE PATH TO REDUCE CONFLICT WITH THE
PHILIPPINES IN THE SOUTH CHINA SEA***

KHOIRUL AMIN¹ NIKEN PUTRI LATIFAH²



OLEH:

NIKEN PUTRI LATIFAH

1811102434042

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI, BISNIS DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

2022

Naskah Publikasi

**Analisis Pendekatan *Bilateral Consultative Mechanism* Sebagai Jalan Damai
China dalam Meredam Konflik dengan Filipina di Laut China Selatan**

***Analysis of Bilateral Consultative Mechanism Approach As China's Peace Path
to Reduce Conflict with The Philippines in The South China Sea***

Khoirul Amin¹ Niken Putri Latifah²



Oleh:

Niken Putri Latifah

1811102434042

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS EKONOMI, BISNIS DAN POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS PENDEKATAN *BILATERAL CONSULTATIVE MECHANISM*
SEBAGAI JALAN DAMAI CHINA DALAM MEREDAM KONFLIK
DENGAN FILIPINA DI LAUT CHINA SELATAN**

Naskah Publikasi

Diajukan oleh

Niken Putri Latifah
1811102434042

Telah disetujui oleh
Pada hari / tanggal, Sabtu / 25 Juni 2022

Menyetujui
Pembimbing



Khoirul Amin, S.IP., M.A
NIDN. 115119001

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS PENDEKATAN *BILATERAL CONSULTATIVE MECHANISM*
SEBAGAI JALAN DAMAI CHINA DALAM MEREDAM KONFLIK
DENGAN FILIPINA DI LAUT CHINA SELATAN**

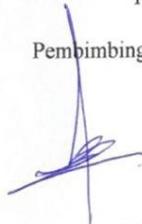
Naskah Publikasi

Diajukan oleh

Niken Putri Latifah
1811102434042

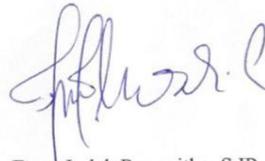
Telah disetujui oleh
Pada hari / tanggal, Kamis / 06 Juli 2022

Pembimbing I,



Khoiril Amin, S.IP., M.A
NIDN.1115119001

Penguji I,



Devy Indah Paramitha, S.IP., M.Han
NIDN. 1116059201

Dekan FEBP,



Dr. M. Farid Wajdi, M.M., Ph.D
NIDN. 0605056501

Ketua Program Studi HI,



Khoiril Amin, S.IP., M.A
NIDN.1115119001

**ANALISIS PENDEKATAN *BILATERAL CONSULTATIVE MECHANISM*
SEBAGAI JALAN DAMAI CHINA DALAM MEREDAM KONFLIK
DENGAN FILIPINA DI LAUT CHINA SELATAN**

Niken Putri Latifah

**Department of International Relations
Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur**

Email: latifahniken70@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa Laut China Selatan merupakan masalah yang hingga saat ini masih belum terselesaikan. Sehingga dalam menghadapi Sengketa Laut China Selatan, China lebih memilih jalan damai sesuai dengan pembangunan *Peaceful Rise* China, yaitu dengan cara melakukan kerja sama bilateral. China akan berupaya berintegrasi lebih dekat dengan negara-negara tetangga dan membuka lebar jalan bagi siapa saja yang ingin turut serta dalam pembangunan China, agar dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Potensi sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, dan ikan yang sangat melimpah di kawasan Laut China Selatan akan sangat menguntungkan apabila dapat di eksplorasi bersama. Selain itu Laut China Selatan juga merupakan kawasan jalur pelayaran kapal-kapal internasional dan perdagangan lintas laut serta menghubungkan tiga jalur perdagangan yaitu, Eropa, Amerika, dan Asia. Salah satu negara yang berhasil China ajak untuk melakukan kerja sama adalah Filipina. Filipina dan China sepakat untuk menjalin kerja sama bilateral agar masalah sengketa Laut China Selatan tidak semakin memanas.

Kata Kunci:

Laut China Selatan, Peaceful rise, Kerja sama Bilateral, China, Filipina

ABSTRACT

The South China Sea dispute is a problem that is still unresolved. So that in dealing with the South China Sea dispute, China prefers a peaceful way in accordance with China's Peaceful Rise development, namely by conducting bilateral cooperation. China will seek to integrate more closely with neighboring countries and pave the way for anyone who wants to take part in China's development, so they can enjoy a better life. The potential of natural resources such as oil, natural gas, and fish which are very abundant in the South China Sea area will be very profitable if they can be explored together. In addition, the South China Sea is also a shipping lane area for international ships cross-area trade and connects three trade routes namely Europe, America and Asia. One of the countries that China has succeeded in inviting to cooperate is the Philippines. The

Philippines and China have agreed to establish bilateral cooperation so that the South China Sea dispute does not escalate.

Keywords:

South China Sea, Peaceful rise, Bilateral Mechanism, China, Philippines

PENDAHULUAN

Sengketa Laut China Selatan merupakan masalah yang hingga saat ini belum juga terselesaikan. Sengketa tersebut terjadi karena tumpang tindih klaim antara negara-negara yang bersengketa. Negara-negara yang mengklaim wilayah Laut China Selatan antara lain adalah China, Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Taiwan. Negara-negara tersebut mengklaim wilayah Laut China Selatan atas dasar alasan historis maupun geografis. Seperti halnya China yang mengklaim wilayah Laut China Selatan dengan berdasarkan kepemilikan bangsa China sejak bertahun-tahun lamanya, China meyakini bahwa pendahulu China sejak 2 abad sebelum masehi yaitu Dinasti Han yang menemukan pulau dan Laut China Selatan pertama kali dan menduduki kawasan laut serta dua gugusan kepulauan Spratly dan Paracel (Sulistiyani dan Nugroho, 2016: 3).

Wilayah Laut China selatan menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah, seperti kandungan minyak serta gas bumi. Lalu, perairan Laut China Selatan merupakan jalur pelayaran kapal-kapal internasional dan perdagangan lintas laut yang menghubungkan tiga jalur perdagangan yaitu, Eropa, Amerika, dan Asia. Kawasan Laut China Selatan dinilai sangat strategis dan akan memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar apabila negara-negara tersebut berhasil menguasainya. Tidak hanya negara-negara Asia Tenggara saja yang ingin menguasai kawasan Laut China Selatan, bahkan Amerika Serikat juga memiliki keinginan untuk menguasai kawasan tersebut (Junef, 2016: 221).

Pada saat melakukan pembacaan pidato di Singapura 2015 lalu, Xi Jinping menyatakan bahwa:

“Pulau-pulau yang berada di Laut China Selatan merupakan bagian dari wilayah China sejak zaman kuno, maka dari itu pemerintah China harus bertanggung jawab dalam melindungi kedaulatan teritorial dan maritim yang sah,”

Xi Jinping juga mengatakan China akan berupaya berintegrasi lebih dekat dengan negara-negara tetangganya dan China membuka lebar jalan bagi negara tetangga untuk turut serta dalam pembangunan China agar dapat menikmati kehidupan yang lebih baik (Wong, 2022).

Melihat konflik sengketa Laut China Selatan yang semakin memanas, Xi Jinping mengatakan bahwa China akan berusaha meredam kasus sengketa wilayah maritimnya menggunakan jalan damai sesuai dengan pembangunan *Peaceful Rise* China, tanpa menggunakan kekuatan militer agar menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan, tetapi China akan tetap mempertahankan klaimnya atas Laut China Selatan sebagai upaya melindungi hak dan kepentingan inti nasional China. Jalan damai yang dilakukan China adalah dengan cara melakukan *Bilateral Consultative Mechanism* dengan Filipina agar tidak terus menimbulkan konflik. Kerja sama bilateral dilakukan untuk meredam sengketa yang terjadi agar tidak terus memanas. Berdasarkan dari pendahuluan ini maka rumusan masalah jurnal ini adalah “Bagaimana pendekatan *Bilateral Consultative Mechanism* China-Filipina dalam meredam sengketa di Laut China Selatan?”. Secara umum China menunjukkan ketegasannya dalam menghadapi klaim Laut China Selatan terhadap beberapa negara tetangganya. Namun demikian, Tiongkok juga melakukan upaya-upaya strategis melalui mekanisme kerja sama bilateral khususnya kepada Filipina. Penelitian ini memandang, pendekatan lunak China menjadi hal yang menarik. Dengan demikian, penelitian ini akan berfokus pada upaya kerja sama bilateral China-Filipina di wilayah Laut China Selatan.

KERANGKA ANALISIS

Penelitian ini menggunakan konsep *model strategic*, Menurut John P. Lovel dalam merumuskan suatu kebijakan, suatu negara pasti memiliki beberapa faktor yang membuat mereka memilih kebijakan tersebut, yang pertama adalah struktur sistem internasional, yang dimaksud struktur sistem internasional menurut Lovel disini adalah negara-negara diibaratkan selalu berkompetisi. Negara-negara berada dalam suatu kompetisi dapat melakukan tawar-menawar serta negosiasi satu sama lain untuk membentuk suatu kerja sama. Kedua adalah persepsi elit,

yang dimaksud persepsi elit menurut Lovel disini adalah suatu perhitungan yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan nasional negaranya. Perhitungan ini akan merujuk kepada suatu hasil kebijakan yang diambil tersebut akan memberikan kerugian atau keuntungan.

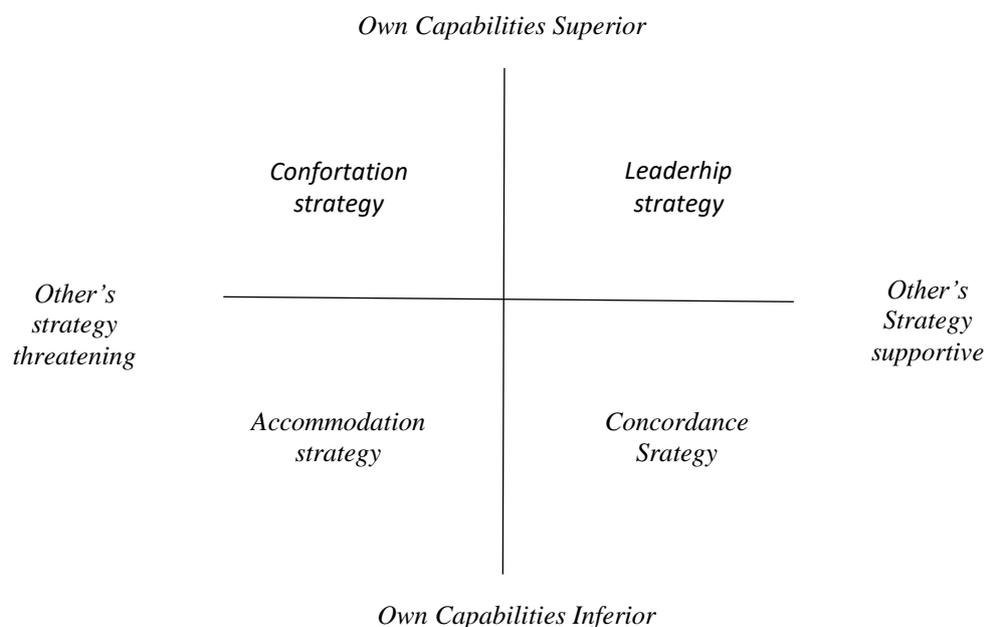
Lalu, yang ketiga adalah strategi negara-bangsa lain, yang dimaksud strategi negara-bangsa lain menurut Lovel disini adalah keberhasilan dari kebijakan suatu negara tidak hanya ditentukan dari negara itu sendiri, tetapi juga ditentukan dengan melihat strategi negara lain. Agar kedua negara yang hendak melakukan kerja sama ini dapat mencocokkan strategi mereka.

Keempat adalah kapabilitas negara, menurut Lovel dalam mengambil kebijakan suatu negara harus memperhitungkan faktor-faktor yang sekiranya dapat digunakan sebagai tolak ukur kapabilitas suatu negara, sehingga suatu negara dapat membandingkan kapabilitas negaranya terhadap kapabilitas negara lain dan dapat mengukur apakah kerja sama yang dijalin akan memberikan keuntungan atau kerugian (Lovel, 1970: 70-74).

Keempat variabel diatas, dapat menentukan suatu pola interaksi negara yang meliputi, pertama adalah *leadership strategy* yaitu posisi yang dimiliki suatu negara dalam mengontrol negara lain melalui persuasi atau tawar menawar daripada menggunakan kekerasan. Pada tipe strategi ini suatu negara menganggap kapabilitasnya besar atau superior dan strategi negara-bangsa lainnya mendukung. Kedua adalah *concordance strategy* yaitu suatu kondisi dimana negara merasa bahwa kapabilitasnya lebih rendah daripada negara lainnya, sehingga menggunakan strategi melakukan kerja sama dengan negara lain yang dianggap mampu mendukung dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Ketiga adalah *accomodation strategy*, strategi ini merupakan kondisi dimana suatu negara merasa bahwa kapabilitasnya lebih rendah daripada negara lain, dan menganggap bahwa negara lainnya yang lebih besar merupakan suatu ancaman. Sehingga negara yang kapabilitasnya kecil tersebut akan melakukan strategi penyesuaian terhadap negara lain, agar terhindari dari konflik. Keempat adalah *confortation strategy*, strategi ini merupakan kondisi dimana suatu negara menganggap kapabilitasnya lebih tinggi daripada negara lain, dan menganggap negara lain

merupakan suatu ancaman dalam memenuhi kepentingan nasionalnya. Sehingga negara tersebut cenderung melakukan hal-hal yang menyebabkan konflik terhadap negara lainnya dan memaksa negara lain untuk mengakui kapabilitasnya (Lovel, 1970: 99).

Untuk lebih memperjelas bagaimana pola interaksi yang terbentuk dari beberapa variabel yang sudah dijelaskan sebelumnya, dapat dilihat pada tabel matriks berikut ini.



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep *model srategic* untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi China dan Filipina dalam merumuskan kebijakan untuk melakukan kerja sama bilateral. Dimana dalam memutuskan suatu kebijakan setiap negara pasti memiliki faktor-faktor yang mendukung keputusan mereka. Berdasarkan dari pembangunan *Peaceful Rise China* pola interaksi yang China ciptakan ialah *leadership strategy* dimana lebih

mengedepankan cara-cara persuasi atau tawar menawar tanpa menggunakan kekerasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif (deskripsi), dalam buku Mohtar Mas'ood ia mengatakan bahwa deskripsi adalah upaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan, berapa atau bagaimana (Mas'ood, 1990: 68). Penelitian deskriptif, yaitu deskripsi tentang fakta (Mas'ood, 1990: 261). Jenis penelitian deskriptif ini mengumpulkan seluruh data kemudian di analisis dan di dibandingkan dengan fakta yang sedang terjadi, kemudian mencoba memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Peneliti mencoba mengumpulkan data-data yang membuktikan bahwa China berupaya menggunakan jalan-jalan damai untuk meredam sengketa Laut China Selatan, sebagai upaya pembangunan Peaceful Rise China.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data kualitatif, yaitu informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tulisan dalam bentuk data. Setelah itu, data yang diperoleh akan diuraikan untuk menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*), yaitu teknik pengumpulan data melalui buku, artikel, jurnal, koran, serta penggunaan media internet melalui *website-website* yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji. Data yang telah dikumpulkan tersebut, kemudian ditelaah sehingga mendapatkan data-data tertulis yang dapat membantu penulisan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Sejarah Sengketa Laut China Selatan

Sengketa Laut China Selatan merupakan masalah sengketa yang terjadi karena adanya perebutan wilayah dan batas-batas laut (Nugroho dan Hikam, 2020). Sengketa telah terjadi bertahun-tahun lamanya dan sampai saat ini kasus tersebut belum menemukan titik terangnya. Tumpang tindihnya klaim yang diajukan negara-negara sekitar kawasan membuat sengketa ini semakin memanas. Sengketa tersebut mengacu kepada dua gugusan pulau yaitu Paracel dan Spratly yang

diperebutkan. Negara-negara yang bersengketa mengklaim Laut China Selatan atas dasar historis maupun basis geografis (Junef, 2016: 220).

China merupakan negara yang mengklaim Laut China Selatan atas dasar historis. China meyakini bahwa pendahulu China sejak 2 abad sebelum masehi yaitu Dinasti Han yang menemukan pulau dan Laut China Selatan pertama kali. Berdasarkan dari hal sejarah tersebutlah yang membuat China pada 1947 meluncurkan peta yang merincikan kedaulatan China atas Laut China Selatan yaitu sembilan garis putus-putus atau dikenal juga sebagai *nine-dash line*. Sembilan garis putus-putus tersebut membentuk huruf U mengelilingi wilayah perairan Laut China Selatan yang 90% wilayahnya diklaim oleh China (Sulistiyani dan Nugroho, 2016: 3). Klaim yang dilakukan China membuat negara-negara yang berlokasi di sekitar perairan Laut China Selatan turut serta mengklaim wilayah perairan mereka. Sehingga menimbulkan tumpang tindihnya klaim antara negara-negara tersebut.

Pada awal 1990-an China sempat mengusulkan untuk melakukan kegiatan penelitian seismik di kawasan Laut China Selatan bersama-sama, ajakan tersebut tidak mendapatkan respon hingga pada 2003 Filipina secara diam-diam menyetujui ajakan untuk melakukan eksplorasi bersama dengan China untuk melakukan pembangunan bersama. Pada 2005 Vietnam mulai bergabung dan tindakan tersebut diketahui oleh publik dan menuai protes karena survei tersebut tidak transparan dan di curigai terjadinya korupsi. Kemudian pada 2008 perjanjian tersebut berakhir dan sejak saat itu negara-negara yang bersengketa mulai melakukan survei secara mandiri. Hal tersebut membuat mereka semakin bermusuhan dan sengketa kian memanas karena mereka saling berusaha menyabotase kegiatan eksplorasi dan menghalangi perusahaan minyak asing untuk bekerja sama (Turcsanyi, 2018: 31).

Pada tahun 2011 China memberlakukan larangan tegas penangkapan ikan di daerah yang disengketakan, Tiongkok juga mengerahkan kapal-kapal ke perairan untuk menjaga kawasan. China juga berupaya meningkatkan administrasi penangkapan ikan di Laut China Selatan dengan menuntut kapal-kapal asing untuk memperoleh izin dari Hainan jika ingin menangkap ikan di kawasan

tersebut. Tindakan pelarangan penangkapan ikan dilakukan China karena pada 2008 terjadi peningkatan jumlah kapal penangkap ikan Vietnam di dekat perairan Paracel. Lalu pada 2011 Filipina melaporkan bahwa China telah berupaya sebanyak 5 kali dalam menyabotase survei eksplorasi minyak Filipina (Turcsanyi, 2018: 41).

Semua tindakan yang China lakukan di perairan tersebut juga semata-mata untuk mempertahankan klaimnya, karena negara-negara yang mengklaim kawasan tersebut juga melakukan hal yang sama. Peningkatan aktivitas China dalam mempertahankan hak penangkapan ikan serta minyak, seiringan dengan peningkatan aktivitas yang dilakukan oleh Filipina dan Vietnam dalam mengeksploitasi sumber daya di perairan tersebut. Filipina dan Vietnam juga meningkatkan aktivitas mereka di perairan tersebut dengan cara meningkatkan jumlah patroli. Masing-masing negara yang bersengketa berusaha menegaskan dan menunjukkan kedaulatannya (Turcsanyi, 2018: 43-44).

Memasuki era kepemimpinan presiden Xi Jinping, strategi militer yang awalnya berbasis pada kekuatan darat mulai bergeser menjadi kekuatan maritim dan menjadi kepentingan inti bagi China (Council on Foreign Relation, 2022). China semakin mengedepankan dan mempertegas klaim mereka di kawasan perairan tersebut dengan membangun beberapa fasilitas sipil maupun militer di pulau-pulau serta perairan yang disengketakan (Zhou, 2022). Reklamasi terus dilakukan di perairan tersebut untuk meningkatkan kondisi hidup para pekerja yang ditugaskan disana agar dan untuk menjaga kedaulatan teritorial serta hak maritim. Tidak hanya China yang melakukan reklamasi di kawasan tersebut, negara-negara lain yang bersengketa juga sedang melakukan reklamasi meskipun lahan mereka tidak seluas China. Masing-masing dari negara tersebut membangun landasan terbang di lahan yang mereka reklamasi (Turcsanyi, 2018: 51). China berhasil menjadi negara yang memiliki infrastruktur paling maju dan mampu mendukung proyeksi militer mereka di kawasan tersebut.

Pada tahun 2015 Xi Jinping membaca sebuah pidato di Singapura, ia mengatakan bahwa:

“Pulau-pula yang berada di Laut China Selatan merupakan bagian dari wilayah China sejak zaman kuno, maka dari itu pemerintah China harus bertanggung jawab dalam melindungi kedaulatan teritorial dan maritim yang sah”

Xi Jinping juga mengatakan China akan berupaya berintegrasi lebih dekat dengan negara-negara tetangganya dan China membuka lebar jalan bagi negara-negara tetangga untuk turut serta dalam pembangunan China agar dapat menikmati kehidupan yang lebih baik (Wong, 2022)

Melihat konflik yang semakin memanas, Xi Jinping mengatakan bahwa China akan berupaya meredam kasus sengketa wilayah maritimnya menggunakan jalan-jalan damai tanpa menggunakan kekuatan militer agar perdamaian dan stabilitas kawasan tetap terjaga. Tindakan tersebut ia lakukan dengan tetap mempertahankan klaim China atas Laut China Selatan dan melindungi hak serta kepentingan inti nasional China. Jalan damai yang dilakukan China adalah dengan cara melakukan kerja sama bilateral terhadap negara-negara yang berada di sekitar kawasan khususnya dengan Filipina.

Potensi Laut China Selatan

Negara-negara yang bersengketa di Laut China Selatan saling memperebutkan wilayah tersebut karena menyimpan sumber daya alam baik hayati dan non-hayati yang sangat melimpah yang berada di pulau-pulau, perairan, dan dasar lautan. SDA non-hayati seperti mineral, gas dan minyak mentah sangat melimpah di wilayah perairan Laut China Selatan. Berdasarkan dari data Kementerian Geologi dan Sumber Daya Mineral Republik China, di perairan tersebut memiliki potensi minyak hingga 213 miliar barel dan kandungan gas alam diperkirakan sebanyak 2 quadrillion kubik per kaki (Sulistiyanti dan Nugroho, 2016: 9). Meningkatnya kebutuhan energi negara-negara yang bersengketa membuat mereka berlomba-lomba untuk mempertahankan klaim mereka atas Laut China Selatan agar bisa mengeksplorasi minyak dan gas yang melimpah di wilayah tersebut.

Selain sumber daya minyak dan gas yang sangat melimpah, kawasan perairan yang sangat luas ini juga menyimpan sumber daya ikan yang sangat besar. Menurut *World Wildlife Fund, Resource Scarcity in the South China Sea* pada 2015, perairan ini berhasil menyumbang kebutuhan ikan sebesar 10% secara global (Reed, 2022). Sektor perikanan merupakan penghasilan utama Asia Tenggara dengan produksi tahunan mencapai 22,5 juta ton pada 2016 dan di prediksi akan terus mengalami peningkatan sebesar 36,9 juta ton pada 2030 dan 51,5 juta ton pada 2050 hal ini membuat sektor perikanan di wilayah Laut China Selatan menjadi sangat penting. Laut China Selatan memiliki lebih dari 3.700 spesies ikan laut, kurang lebih sebesar 22% dari total spesies ikan laut yang ada di dunia (Basundoro, 2020). Bagi rakyat Filipina perairan ini sangat penting guna memenuhi kebutuhan pokok mereka dimana ikan merupakan makanan utama penduduk Filipina, Laut China Selatan menyumbang sebesar 25% protein yang dibutuhkan 500 juta penduduk serta memenuhi sebesar 80% dari kebutuhan makanan masyarakat Filipina. Perairan ini menempati urutan ke 19 dalam hal produksi hasil laut dengan jumlah tangkapan sebesar 8 juta ton ikan per tahunnya (Sulistiyanti dan Nugroho, 2016: 9).

Selain sumber daya alam hayati dan non-hayati yang sangat melimpah, Laut China Selatan juga merupakan jalur pelayaran yang sangat strategis. Secara geografis Laut China Selatan berada di antara dua samudera yaitu Pasifik dan Hindia, serta dua benua yaitu Asia dan Australia. Kawasan ini merupakan jalur pelayaran kapal-kapal internasional dan perdagangan lintas laut serta menghubungkan tiga jalur perdagangan yaitu, Eropa, Amerika, dan Asia. Berbagai komoditas, seperti minyak bumi dan gas alam berlalu-lalang di kawasan ini. *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) memperkirakan bahwa sepertiga perdagangan maritim global melalui perairan ini. Pada 2018 nilai perdagangan yang melewati kawasan ini mencapai US\$ 3,7 triliun, dimana hal tersebut merupakan pendapatan tertinggi kedua di dunia setelah Selat Hormuz (Basundoro, 2020: 1). Banyaknya potensi strategis yang dimiliki kawasan perairan ini membuat para negara-negara yang bersengketa berusaha untuk tetap mempertahankan klaimnya. Masing-masing negara yang bersengketa

memiliki kepentingannya tersendiri yang tetap membuat mereka mempertahankan klaim atas Laut China Selatan. Salah satunya adalah melimpahnya sumber daya alam di Laut China Selatan baik hayati maupun non-hayati, yang sangat menarik bagi negara-negara yang bersengketa. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin maju, tentu saja kebutuhan energi juga meningkat, sehingga mereka berusaha untuk tetap mempertahankan klaimnya (Nugroho, 2022).

Sejarah Hubungan China dan Filipina

Setiap periode kepemimpinan presiden Filipina, kebijakan masing-masing presiden yang memimpin memiliki pandangan yang berbeda terhadap sengketa Laut China Selatan. Misalnya, pada masa kepemimpinan Presiden Joseph E. Estrada yang lebih mendekatkan hubungan kerja sama militer bersama dengan Amerika Serikat agar bisa menghadapi ancaman militer yang datang dari China agar bisa mempertahankan wilayah yang Filipina klaim di wilayah Laut China Selatan. Begitu juga dengan masa kepemimpinan Presiden Gloria Macapagal Arroyo yang melihat bahwa menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dapat memperkuat sistem pertahanan Filipina dan melindungi Filipina dari sikap agresivitas China di Laut China Selatan (Damping, 2020: 621).

Pada masa kepemimpinan Presiden Benigno Aquino III, Filipina masih bersikap konfrontatif terhadap China, dimana Filipina menganggap sengketa Laut China Selatan tidak dapat diselesaikan dengan kerja sama bilateral dan pada tahun 2013 melayangkan gugatan arbitrase secara sepihak ke Mahkamah Arbitrase Internasional. Hasil gugatan arbitrase tersebut keluar pada 2016 dan dimenangkan oleh Filipina, tetapi putusan tersebut di bantah oleh China. Tiongkok sangat menolak tindakan intervensi dari pihak ketiga, menurut China Pengadilan Arbitrase Internasional tidak memiliki hak atas sengketa yang terjadi di wilayah Laut China Selatan, karena wilayah tersebut merupakan kedaulatannya. Tiongkok menekankan bahwa wilayah kedaulatan China merupakan suatu hal yang sah dan tidak dapat di tawar (Amir, et al., 2017: 90).

Kemudian, pada masa kepemimpinan Presiden Rodrigo Duterte terdapat suatu perubahan besar dimana Filipina menjadi lebih terbuka dan mau bekerja sama

dengan China. Duterte memiliki beberapa kepentingan yang ingin ia capai, yaitu ingin melindungi keamanan dan kesatuan wilayah serta kepentingan nasional Filipina. Meskipun sengketa masih terjadi, China dan Filipina mengesampingkan permasalahan tersebut dan mulai melakukan kerja sama bilateral. Duterte lebih memilih jalan damai untuk meredam sengketa dengan China karena tidak ingin menghadapi konflik yang lebih besar lagi, bahkan Duterte mengurangi kerja sama dengan Amerika Serikat (Damping, 2020: 622).

***Bilateral Consultative Mechanism* sebagai jalan damai yang ditempuh oleh China dan Filipina**

Bilateral Consultative Mechanism

Sebagai upaya menjalankan pembangunan *Peaceful Rise* yang berusaha menjalin kerja sama menggunakan jalan-jalan damai. China dan Filipina menjalankan *Bilateral Consultative Mechanism* (BCM) sebagai hasil dari meningkatnya hubungan baik antara China dan Filipina. BCM dibentuk untuk bertukar pandang tentang masalah yang sedang terjadi oleh kedua belah pihak negara. Kedua negara sepakat untuk melanjutkan diskusi tentang langkah-langkah membangun kepercayaan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan di Laut China Selatan yang dapat meningkatkan perselisihan yang mengganggu perdamaian serta stabilitas kawasan (Fook, 2018: 1).

Pertemuan pertama BCM dilakukan pada 19 Mei 2017, pertemuan ini berlangsung di tengah kritik internasional terhadap ekspansi China di dua kepulauan Laut China Selatan yaitu Paracel dan Sparty. Meskipun terdapat penolakan internasional terhadap China, pertemuan pertama BCM ini menjadi suatu titik balik dalam hubungan China-Filipina yang membuka komunikasi antara kedua negara, setelah selama 4 tahun saling mengabaikan dan menyimpan dendam satu sama lain pada masa pemerintahan Presiden Aquino III. China dan Filipina bertukar pandangan tentang masalah regional dan kekhawatiran bilateral di kawasan Laut China Selatan, serta kedua negara sepakat untuk membahas lebih lanjut untuk mencari pendekatan apa yang dapat dilakukan guna mengatasi

permasalahan tersebut. China dan Filipina memutuskan untuk melakukan kerja sama guna menghindari konflik agar mencegah terjadinya masalah yang lebih besar (Banloi, 2021).

Pertemuan kedua BCM dilakukan pada 13 Februari 2018, pada pertemuan ini masih terdapat kecemasan internasional terhadap China yang diduga meningkatkan aktivitas militernya di kawasan Laut China Selatan. Duterte juga berusaha menghadapi protes dari masyarakatnya yang menyerukan kemenangan Filipina di arbitrase internasional. Duterte mengatakan bahwa peningkatan aktivitas militer China ditujukan kepada Amerika Serikat bukan kepada Filipina. Meskipun China dan Filipina menghadapi tekanan internasional serta domestik, mereka tetap berupaya menjalin BCM dan meningkatkan beberapa agenda. China dan Filipina membahas membahas cara-cara khusus untuk mengelola dan mengatasi insiden di laut, menjalin kerja sama dalam mengatasi masalah maritim, serta menumbuhkan rasa saling percaya antara kedua negara. Setelah mengadakan pertemuan BCM yang pertama, hubungan kedua negara menjadi membaik dan menjadi lebih terbuka dan memperkuat kerja sama di berbagai bidang seperti perlindungan lingkungan laut, perikanan, penelitian ilmiah di laut serta minyak dan gas (Banloi, 2021: 311).

Pertemuan ketiga BCM dilakukan pada 18 Oktober 2018, pada pertemuan ini China dan Filipina masih belum terlepas dari kecemasan internasional dan semakin mendesak Duterte yang mengesampingkan kemenangan Filipina pada arbitrase. China dan Filipina tidak goyah meskipun mendapatkan kecemasan keras dari dunia internasional dan kedua negara membuat keputusan penting untuk melakukan eksplorasi bersama. Kedua negara menandatangani *Memorandum of Understanding on Cooperation in Oil and Gas Development* pada 20 November 2018. Kedua negara juga menegaskan kembali komitmen mereka atas prinsip-prinsip kebebasan navigasi di LCS. Serta menegaskan kembali komitmen kedua negara dalam menjaga kebebasan perdagangan internasional, menangani sengketa teritorial dengan jalan damai tanpa menggunakan ancaman atau penggunaan kekuatan (Banloi, 2021: 312).

Pertemuan keempat BCM dilakukan pada 2-3 April 2019, dalam pertemuan ini kedua negara terus memperkuat rasa saling percaya dan berusaha menangani sengketa dengan menggunakan jalan-jalan damai. Meskipun terdapat beberapa perbedaan pandangan dalam menghadapi sengketa Laut China Selatan China dan Filipina tetap memperkuat rasa saling percaya antara kedua negara. Perbedaan pandangan yang terjadi antara China dan Filipina di Laut China Selatan jangan sampai mempengaruhi kerja sama yang saling menguntungkan di bidang-bidang lain China dan Filipina juga menegaskan kembali komitmen mereka untuk mengatasi sengketa dengan damai tanpa menggunakan kekerasan.

Pertemuan BCM kelima dilakukan pada 28 Oktober 2019, pada pertemuan ini China dan Filipina membentuk dua kelompok kerja, yaitu Kelompok Kerja Keamanan Politik serta kerja sama Perikanan dan kelompok kerja kedua adalah Kelompok Kerja Penelitian Ilmiah Kelautan dan Perlindungan Lingkungan Laut. Pembentukan kelompok ini merupakan upaya dari kedua negara untuk menunjukkan bahwa mereka telah melakukan sesuatu yang nyata. Pada pertemuan ini kedua negara juga mengadakan pertemuan pertama komite pengarah bersama antara pemerintah China dan Filipina untuk membahas eksplorasi minyak dan gas bersama (Banloi, 2021: 312-313).

Pertemuan BCM keenam dilakukan secara virtual pada 22 Mei 2021, pertemuan dilakukan secara virtual karena terkendala pandemi Covid-19. Pada pertemuan ini China dan Filipina tetap berusaha untuk memperluas hubungan bilateral mereka dan membangun kepercayaan bagi kedua negara agar dapat mengatasi berbagai perbedaan, China dan Filipina saling bertukar pandangan tentang segala isu yang menjadi permasalahan di Laut China Selatan. Sangat penting bagi kedua negara untuk mengatasi segala perbedaan pandangan agar dapat membuka jalan bagi kerja sama yang lebih baik (Department of Foreign Affairs, 2021).

Berdasarkan dari enam pertemuan yang sudah dipaparkan peneliti diatas, dapat dilihat bahwa berjalannya *Bilateral Consultative Mechanism* antara China dan Filipina mendapat kecaman dari dunia internasional maupun domestik, serta diduga masih ada tindakan-tindakan sepihak tetapi tidak memunculkan eskalasi

konflik yang lebih besar terhadap kedua negara. China dan Filipina juga benar-benar berupaya menjalankan cara-cara damai meskipun mendapatkan kecaman. Kedua negara dapat melaksanakan berbagai kerja sama yang direncanakan seperti pengelolaan perikanan bersama, penelitian ilmiah kelautan, perlindungan lingkungan laut, pengembangan minyak dan gas, serta operasi pencarian dan penyelamatan bersama.

Joint Development

Pada saat menjalankan pertemuan BCM yang ketiga pada 2018 China dan Filipina memutuskan untuk menjalin *joint development*. *Joint development* merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk negara-negara yang sedang berada dalam sengketa. Terdapat syarat yang harus di penuhi untuk melakukan *joint development*, yaitu *political will* yang merupakan kesepakatan antara kedua negara untuk dapat mengakui adanya sengketa yang terjadi dan keinginan untuk saling menjembatani sengketa dengan memberikan solusi kerja sama di bidang eksplorasi sumber daya alam untuk memenuhi kepentingan bersama. Dapat dilihat bahwa *joint development* memberikan peluang bagi kedua negara dalam memperkuat hubungan bilateral mereka dan menghasilkan *win win solution* (Andaru, 2020: 348).

Perlu diketahui bahwa *joint development* bukanlah solusi untuk penyelesaian sengketa, melainkan hanya sebuah bentuk kerja sama agar sengketa tidak terus memanas. Ketika kedua negara menyepakati *joint development* status quo wilayah yang sedang di sengketa akan tetap ada, tetapi dengan adanya *joint development* pihak yang bersengketa dapat memperoleh keuntungan dengan adanya eksplorasi sumber daya alam bersama (Andaru, 2020: 350).

Definisi *joint development* berdasarkan *British Institute of International and Comparative Law* mengacu pada kerja sama antar negara atas minyak dan gas yang berada di lepas pantai yang terletak pada wilayah laut yang sedang berada dalam sengketa. Serta definisi lain mengenai *Joint development* adalah negara-negara yang sedang di dalam sengketa wilayah, memiliki hak untuk saling mengeksplorasi sumber daya yang di miliki wilayah tersebut. *Joint development*

menjadi suatu aktivitas lintas batas dan aktivitas yang terjadi di wilayah yang mengalami klaim tumpang tindih (Li dan Chen, 2016: 132).

Dalam Piagam PBB tahun 1974 yang mengatur tentang Hak Ekonomi dan Kewajiban Negara. Pasal 3 mengatur:

“Dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki bersama oleh dua negara atau lebih, setiap negara harus bekerja sama berdasarkan sistem informasi dan konsultasi terlebih dahulu untuk mencapai penggunaan yang optimal dari sumber daya tersebut tanpa merugikan kepentingan sah pihak lain”

Dalam menjalin *joint development* terdapat beberapa penekanan, yaitu yang pertama adalah negara-negara yang mengeksplorasi sumber daya alam dituntut untuk dapat bekerja sama satu sama lain. Kedua, kerja sama disini adalah untuk tujuan penggunaan sumber daya secara optimal. Ketiga, hak-hak negara lain harus tetap di hormati misalnya seperti hak navigasi (Li dan Chen, 2016: 133).

Joint development merupakan salah satu langkah yang dilakukan China untuk meredam sengketa Laut China Selatan. Salah satu negara yang China ajak untuk melakukan *joint development* adalah Filipina. China dan Filipina setuju untuk melakukan *joint development* untuk melakukan eksplorasi minyak bersama. Pada masa pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, ia lebih berusaha untuk mendekatkan diri dengan China sebagai upaya meredam sengketa Laut China Selatan. Terjadi pergeseran kepentingan politik luar negeri pada saat Duterte memimpin, ia menyatakan bahwa akan mengejar kebijakan luar negeri yang independen yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar negara. Duterte berusaha menyeimbangkan hubungan Filipina dengan negara-negara besar (Candice dan Perwita, 2021: 1).

Pemerintahan baru di bawah Presiden Duterte memutuskan untuk menghidupkan kembali dan memperluas strategi yang berfokus pada pengecilan eskalasi konflik dan bergabung dalam berbagai kegiatan kerja sama yang dapat meningkatkan hubungan ekonomi. Mengembangkan kembali manajemen konflik berkelanjutan yang dapat mengurangi munculnya eskalasi konflik dan membangun kerangka kerja sama agar konflik dapat ditangani dengan aman

(Kreuzer, 2018: 2). Duterte bersedia menerima prosedur-prosedur yang diajukan China untuk menangani konflik, mengesampingkan masalah-masalah kedaulatan, serta mengelola konflik dalam forum bilateral. China dan Filipina memperbaiki hubungan mereka dengan melakukan eksplorasi bersama dan kerja sama di kawasan Laut China Selatan serta memperkuat perdagangan bilateral, bahkan China juga mendukung pembangunan Filipina (Kreuzer, 2018: 15).

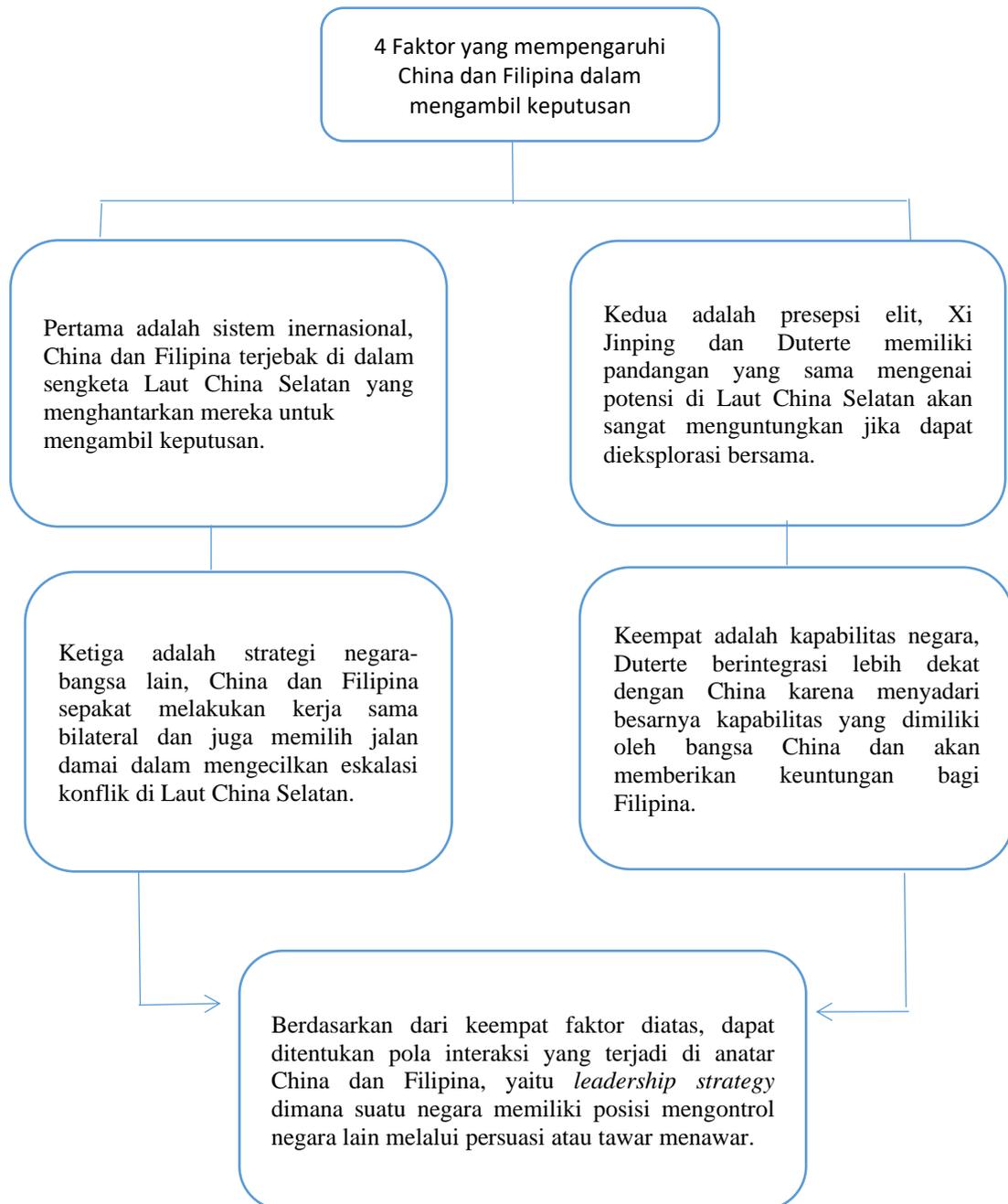
Pada saat kunjungan Presiden Xi Jinping ke Manila pada November 2018, Filipina dan China berhasil menandatangani *Memorandum of Understanding on Oil and Gas Development Cooperation* (Qi dan Xue, 2021: 78). Ada beberapa faktor yang membuat Duterte ingin melakukan *joint development* dengan China, yaitu untuk menghindari konflik bersenjata maupun tidak bersenjata, untuk meredakan ketegangan geopolitik regional, serta untuk melakukan diplomasi preventif dan ekonomi. Duterte juga mengatakan bahwa sebaiknya sumber daya di Laut China Selatan harus dieksplorasi bersama daripada harus terus menerus menghadapi konflik (Qi dan Xue, 2021: 82). China akan membantu kepentingan ekonomi dan energi Filipina untuk menghindari krisis listrik dan minyak, karena dapat diprediksi bahwa cadangan ladang gas Malampaya yang memasok 40% kebutuhan energi Filipina akan segera habis. Pada saat penandatanganan MoU November 2018, China dan Filipina membentuk *Joint Intergovernmental Steering Committee dan Inter-Entrepreneurial Working Group* yang secara khusus akan menekankan kerangka kerja yang telah kedua negara setujui. Komite tersebut terdiri dari anggota badan asing dan energi kedua negara, sedangkan kelompok kerja terdiri dari perwakilan dari *China National Offshore Oil Corporation* (CNOOC) dan *Phillippine National Oil Company Exploration Corporation* (PNOC-EC) (Qi dan Xue, 2021: 83). Hingga saat ini MoU yang berhasil di tandatangani pada tahun 2018 oleh China dan Filipina masih dalam peninjauan ulang. Pada 15 Oktober 2020 (Radio Free Asia, 2021), Duterte mengumumkan pencabutan moratorium eksplorasi minyak dan gas alam di Reed Bank, dimana sebelumnya ia memberlakukan pelarangan eksplorasi energi di daerah Reed Bank. Pencabutan moratorium tersebut di sambut baik oleh China dan kedua negara telah membentuk mekanisme kerja sama. *PXP Energy Corp* Filipina sedang

bernegosiasi dengan CNOOC untuk pengembangan minyak bersama (Castro, 2020).

Bilateral Consultative Mechanism: Pengawasan dan Persuasi Dalam Pengelolaan Sengketa Wilayah di Kawasan Laut China Selatan Secara Damai

Pada bagian ini peneliti akan menjabarkan variabel yang mempengaruhi China dan Filipina untuk menjalin kerja sama bilateral. Menurut John P. Lovel dalam merumuskan suatu kebijakan, suatu negara pasti memiliki beberapa faktor yang membuat mereka memilih kebijakan tersebut, yaitu struktur sistem internasional, persepsi elit, strategi negara-bangsa lain, dan kapabilitas negara (Lovel, 1970: 70-74). Dibawah ini merupakan kerangka alur dari faktor-faktor yang mempengaruhi China dan Filipina dalam pengambilan kebijakan dan membentuk suatu pola interaksi.

Bagan 1 Kerangka Alur Pemikiran



Dari kerangka materi diatas dapat kita lihat bahwa faktor-faktor yang dipilih China dan Filipina dalam menentukan suatu kebijakan membentuk suatu pola interaksi. Berikut adalah uraian faktor-faktor yang mempengaruhi China dan Filipina untuk melakukan kerja sama bilateral. Pertama adalah sistem internasional, seperti yang kita ketahui China dan Filipina terlibat dalam konflik sengketa Laut China Selatan. Sengketa Laut China Selatan telah terjadi bertahun-tahun lamanya hingga saat ini permasalahan sengketa masih berlangsung. Sengketa terjadi karena adanya tumpang tindih klaim antara negara-negara yang bersengketa, terjadi perebutan wilayah dan juga batas-batas laut. Sengketa ini mengacu kepada dua gugusan pulau yang diperebutkan yaitu Paracel dan Spratly. Tumpang tindih klaim yang diajukan oleh negara-negara disekitar kawasan tersebut membuat sengketa semakin memanas (Junef, 2016: 213).

Melihat sengketa yang semakin memanas, pada 2015 Xi Jinping mengatakan akan menggunakan jalan damai untuk meredam sengketa Laut China Selatan. China akan berupaya untuk berintegrasi lebih dekat dengan negara-negara tetangganya dan akan membuka jalan bagi negara-negara yang ingin bergabung dalam pembangunan untuk dapat menikmati kehidupan yang lebih baik (Wong, 2022). Jalan damai yang dipilih China menyesuaikan dengan konsep *Peaceful Rise* yang diluncurkan China untuk dapat membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan memberlakukan negara tetangga sebagai mitra, untuk menciptakan lingkungan regional yang damai, stabil, dan saling percaya (China's Peaceful Development on White Paper, 2011).

Lalu yang kedua adalah persepsi elit para pengambil kebijakan, Xi Jinping melihat kawasan Laut China Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat menguntungkan, sehingga lebih baik potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik, yaitu dengan melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara yang juga bersengketa di Laut China Selatan khususnya dengan Filipina (Zhou, 2015). Xi Jinping ingin mewujudkan "*Chinese Dream*" yang merupakan kebangkitan negara China. Ia berusaha kembali membangkitkan masa kejayaan China yang dikenal sebagai bangsa yang beradab, diiringi dengan kebangkitan perekonomiannya (Fatmasiwi, 2018: 3). Tiongkok juga memiliki gagasan

“*Community of Common Destiny*” yang memiliki tujuan bersatu menghadapi masalah, berusaha mengupayakan pembangunan bersama, serta perdamaian abadi (Aulia, 2020: 67).

Di sisi lain, persepsi yang dibangun oleh para pemimpin Beijing juga beriringan dengan sikap dari Filipina. Presiden Duterte juga memiliki pendapat yang sama dengan Xi Jinping dimana ia mengatakan bahwa sebaiknya sumber daya alam di Laut China Selatan di eksplorasi bersama karena memiliki potensi yang menguntungkan (Qi dan Xue, 2021: 82). Pemerintahan baru di bawah Presiden Duterte memutuskan untuk menghidupkan kembali dan memperluas strategi yang berfokus pada pengecilan eskalasi konflik dan bergabung dalam berbagai kegiatan kerja sama yang dapat meningkatkan hubungan ekonomi. Mengembangkan kembali manajemen konflik berkelanjutan yang dapat mengurangi munculnya eskalasi konflik dan membangun kerangka kerja sama agar konflik dapat ditangani dengan aman (Kreuzer, 2018: 2).

Ketiga adalah strategi negara-bangsa lain, seperti yang telah penulis paparkan di atas China dan Filipina sepakat melakukan kerja sama bilateral karena melihat potensi sumber daya alam yang sangat strategis dan menguntungkan. China dan Filipina juga sama-sama memilih jalan damai untuk mengecilkan eskalasi konflik di Laut China Selatan. Atas kesepakatan mereka tersebut maka terbentuklah *Bilateral Consultative Mechanism* yang dibentuk untuk bertukar pandang tentang masalah yang sedang terjadi oleh kedua belah pihak negara. Kedua negara sepakat untuk melanjutkan diskusi tentang langkah-langkah membangun kepercayaan untuk meningkatkan rasa saling percaya dan menahan diri untuk tidak melakukan kegiatan di Laut china selatan yang dapat meningkatkan perselisihan yang mengganggu perdamaian serta stabilitas kawasan.

Keempat adalah kapabilitas negara, Filipina berupaya berintegrasi lebih dekat dengan China karena ada beberapa kepentingan yang ingin ia capai, seperti melindungi keamanan dan kesatuan wilayah serta mencapai kepentingan nasionalnya. Walaupun sengketa masih terjadi Filipina mengesampingkan permasalahan tersebut dan mulai melakukan kerja sama bilateral (Damping, 2020: 621). Terjadi pergeseran kepentingan politik luar negeri pada saat Duterte

memimpin, ia menyatakan bahwa akan mengejar kebijakan luar negeri yang independen yang bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar negara. Duterte berusaha menyeimbangkan hubungan Filipina dengan negara-negara besar (Candice dan Perwita. 2021:1).

China dan Filipina melakukan *Bilateral Consultative Mechanism* dan berupaya menciptakan kerja sama jalan damai dan rasa saling percaya. Sebagai hasil dari membaiknya hubungan China dan Filipina, kedua negara tersebut menjalani persahabatan yang lebih erat. Pada kunjungan Xi Jinping ke Filipina pada 2018, kedua negara memilih kerja sama strategis yang komprehensif dan menyeluruh. China dan Filipina memperkuat kerja sama bilateral di berbagai bidang, seperti infrastruktur, investasi, perdagangan, pendidikan, pariwisata, pertahanan, dan penegakan hukum (Banloi, 2021: 308). Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun, Filipina menjadi mitra dagang terbesar China sebagai pasar ekspor terbesar mencapai hampir \$56 miliar pada tahun 2018. China juga berhasil menjadi negara yang memberikan investasi besar kepada Filipina yang mencapai \$67 juta pada 2018 dan sumber alokasi modal terbesar sekitar \$100 juta pada 2019 (Banloi, 2021: 309-310).

Berdasarkan dari keempat variabel diatas, dapat ditentukan pola interaksi negara yang terbentuk. Pola interaksi yang terjadi di antara China dan Filipina masuk kedalam *Leadership Strategy*. Dimana *leadership strategy* menurut Lovel adalah suatu negara memiliki posisi dalam mengontrol negara lain melalui persuasi atau tawar-menawar daripada menggunakan kekerasan. Pada tipe strategi ini suatu negara menganggap kapabilitasnya besar atau superior dan strategi negara-bangsa lainnya mendukung. Sesuai dengan pembangunan *Peaceful Rise* yang ingin dicapai China adalah menawarkan pembangunan damai. China juga berupaya membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan memberlakukan negara tetangga sebagai mitra, untuk menciptakan lingkungan regional yang damai, stabil, dan saling percaya. Pada masa kepemimpinan Presiden Duterte ia lebih mendekatkan diri kepada China karena ada beberapa kepentingan yang ingin ia capai, seperti melindungi keamanan dan kesatuan wilayah serta mencapai kepentingan nasionalnya. Salah satu kepentingan nasional

yang ingin dicapai Duterte adalah menjaga stabilitas perekonomian Filipina. Untuk dapat meningkatkan perekonomian Filipina maka harus menjalin kerja sama ekonomi dengan negara lain dan Filipina memilih China sebagai mitranya (Damping, 2020: 622). Bisa dilihat disini bahwa Filipina menganggap China memberikan keuntungan dan memiliki kapabilitas yang lebih besar daripada Filipina. Sehingga Filipina setuju untuk berintegrasi dengan China.

Filipina mendekati diri dengan Filipina, selain karena tertarik dengan keuntungan ekonomi yang diberikan China demi memenuhi kepentingan nasionalnya. Filipina juga ingin mengatasi sengketa Laut China Selatan dengan jalan damai, Duterte memilih jalan damai karena menghindari konflik yang lebih besar dengan China (Damping, 2020: 623). Duterte bersedia menerima prosedur-prosedur yang diajukan China untuk menangani konflik, mengesampingkan masalah-masalah kedaulatan, serta mengelola konflik dalam forum bilateral (Kreuzer, 2018: 15). Atas ketersediaan Duterte tersebut maka China dan Filipina mengambil langkah damai melalui *Bilateral Consultative Mechanism* (BCM). BCM tersebut berjalan dengan lancar hingga pada pertemuan mereka yang keenam pada 2021, kerja sama ini dibentuk untuk dapat saling bertukar pandang tentang segala permasalahan yang terjadi di kedua belah pihak negara dan membangun rasa saling percaya antara kedua negara dalam mengatasi sengketa Laut China Selatan. Dalam menjalankan BCM tersebut kedua negara juga menyetujui melakukan *joint development* untuk dapat melakukan eksplorasi sumber daya minyak bersama di kawasan Laut China Selatan. Hingga saat ini *joint development* tersebut masih dalam peninjauan bersama.

Meskipun China memilih jalan damai dalam meredam sengketa Laut China Selatan tanpa menggunakan kekuatan militer atau kekerasan lainnya. China tetap meningkatkan kekuatan militernya untuk menjaga hak maritimnya. China memperkuat angkatan bersenjata yaitu *People's Liberation Army* (PLA) yang memiliki beberapa fokus utama, antara lain, membangun militer yang kuat, menjaga kedaulatan, keamanan dan kepentingan China (Brown, 2016). PLA dikerahkan di wilayah Laut China Selatan sebagai bentuk pengawasan dalam menjaga kepentingan China.

KESIMPULAN

Sengketa Laut China Selatan merupakan masalah yang hingga saat ini belum juga terselesaikan. Sengketa tersebut terjadi karena tumpang tindih klaim antara negara-negara yang bersengketa. Negara-negara yang mengklaim wilayah Laut China Selatan antara lain adalah China, Filipina, Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Taiwan. Wilayah Laut China selatan menyimpan kekayaan alam yang sangat melimpah, seperti kandungan minyak serta gas bumi. Lalu, perairan Laut China selatan merupakan jalur pelayaran kapal-kapal internasional dan perdagangan lintas laut yang menghubungkan tiga jalur perdagangan yaitu, Eropa, Amerika, dan Asia. Kawasan Laut China Selatan dinilai sangat strategis dan akan memberikan keuntungan ekonomi yang sangat besar apabila negara-negara tersebut berhasil menguasainya. Dalam mengatasi sengketa Laut China Selatan, China lebih memilih menggunakan jalan-jalan damai. Jalan damai yang dipilih China menyesuaikan dengan konsep *Peaceful Rise* yang diluncurkan China untuk dapat membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan memberlakukan negara tetangga sebagai mitra, untuk menciptakan lingkungan regional yang damai, stabil, dan saling percaya.

Xi Jinping mengatakan bahwa China ingin menyelesaikan sengketa wilayah maritimnya dengan jalan damai dan negosiasi serta terus meningkatkan kemampuan pertahanannya agar tetap dapat melindungi hak dan kepentingan maritimnya. Xi Jinping melihat kawasan Laut China Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat menguntungkan, sehingga lebih baik potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik, yaitu dengan melakukan kerja sama bilateral dengan negara-negara yang juga bersengketa di Laut China Selatan. Salah satu negara yang berhasil China ajak dalam melakukan kerja sama bilateral adalah Filipina.

Berdasarkan dari 4 variabel dalam pengambilan kebijakan dapat dirumuskan suatu pola interaksi. Pola interaksi yang terjadi di antara China dan Filipina masuk ke dalam *Leadership Strategy*. Dimana China menawarkan pembangunan perdamaian melalui *Peaceful Rise*, sejalan dengan keinginan Duterte yang ingin

berintegrasi dengan jalan damai dan Duterte bersedia menerima prosedur-prosedur yang diajukan China untuk menangani konflik, mengesampingkan masalah-masalah kedaulatan, serta mengelola konflik dalam forum bilateral. Sehingga China dan Filipina menyepakati *Bilateral Consultative Mechanism* (BCM) yang merupakan upaya meningkatkan rasa saling percaya dan menahan diri dalam melakukan kegiatan di Laut China Selatan yang dapat semakin memperumit sengketa. China dan Filipina berhasil menjalin BCM dengan baik hingga pertemuan terakhir mereka pada tahun 2021.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing serta dosen penguji saya yaitu pak Khoirul Amin dan Miss Devy yang telah membantu saya dalam mengerjakan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Lovel, JP. (1970). "Foreign Policy in Perspective: Strategy, Adaption, Decision Making" New York: The Dryden Press, p.70-99.
- Mas'ood, M. (1990). "Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi" LP3ES, Jakarta, p. 68-261.
- Turcsanyi, RQ. (2018). "Chinese Assertiveness in the South China Sea" Global Power Shift. p. 31-52.

Artikel Jurnal

- Amir, F et. Al. (2017). "Penolakan China terhadap Arbitrase Filipina atas Penyelesaian Klaim Laut China Selatan" E-SOSPOL Vol. 5, edisi 2, p. 90, dalam <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/E-SOS/article/download/5713/4256/> (diakses pada:10/5/2022. 09.05 WITA)
- Andaru, DDA. (2020). "Joint Development Agreement Sebagai Solusi Penyelesaian Sengketa Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Laut Natuna" Masalah-Masalah Hukum, Jilid 49 No. 4 p. 348-350, dalam <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/download/30214/18132> (diakses pada:12/5/2022. 08.13 WITA)
- Banloi, RC (2021). "45 Years of Philippines -China Relations and the South China Sea Dispute: Towards Comprehensive Strategic Cooperation During the Covid-19 Pandemic" Chinese Studies Journal, Vol.14. p. 311. (diakses pada:3/7/2022. 13.10 WITA)
- Banloi, RC. (2016). "Duterte Presidency: Shift in Phillipine-China Relations" RSIS Commentary No. 121, 20 May dalam <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2016/05/CO16121.pdf> (diakses pada: 3/7/2022. 14.00 WITA)
- Banloi, RC. (2021). "The Bilateral Consultative Mechanism on the South China Sea and Philippines- China Relation" ISEAS Yusof Ishak Insitute, 2021. p.309-313, dalam <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-51-the-bilateral-consultative-mechanism-on-the-south-china-sea-and-philippines-china-relations-by-rommel-c-banlai/> (diakses pada:3/7/2022. 16.05 WITA)
- Brown, K. (2016). "Foreign Policy Making Under Xi Jinping: The Case of the South China Sea" Jurnal of Political Risk, Vol. 4, No.2 February, dalam <https://www.jpolarisk.com/foreign-policy-making-under-xi-jinping-the-case-of-the-south-china-sea/> (diakses pada:17/2/2022. 08.06 WITA)

- Candice, JJ & Perwita, AAB. (2021). "The Shift and Continuity of the Philippines Foreign Policy Under Rodrigo Duterte on the South China Sea Issue" *Jurnal Dinamika Global* Vol. 6, Juni. p.1, dalam <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/396/249> (diakses pada:6/6/2022. 07.35 WITA)
- Castro, RCD. (2020) "A Philippine-China deal on Joint Development in the Making" *Asia Maritime Transparency Initiative* , dalam <https://amti.csis.org/a-philippine-china-deal-on-joint-development-in-the-making/> diakses pada 10 Juni 2022. (diakses pada:10/6/2022. 15.55 WITA)
- Damping, G. (2020). "Perubahan Kebijakan Luar Negeri Filipina Terhadap China di Bawah Kepemimpinan Presiden Rodgrigo Duterte Terhadap China dalam Konflik Laut China Selatan" *Journal of International Relations*, Vol. 6, No.4 , p 621-623 dalam <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/download/28836/24471> diakses pada:10/3/2022. 11.34 WITA)
- Fook, LL. (2018). "The China-Philippine Bilateral Consultative Mechanism on South China Sea: Prospets and Challenges" *ISEAS Yusof Ishak Institute*, p. 1. (diakses pada:11/4/2022. 07.06 WITA)
- Fajri, D. (2022). "Sengketa yang Terjadi di Laut China Selatan dan Dampaknya Terhadap Hubungan Internasional" Januari dalam https://www.researchgate.net/publication/357526689_SENGKETA_YANG_TERJADI_DI_LAUT_CINA_SELATAN_DAN_DAMPAK_NYA_TERHADAP_HUBUNGAN_INTERNASIONAL.> (diakses pada: 11/4/2022. 10.57 WITA)
- Junef, M. (2016). "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan" *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 18, No. 2. p. 213-221 dalam <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/420> (diakses pada: 19/2/2022. 11.09 WITA)
- Kreuzer, P. (2018) "Dealing With China in the South China Sea: Duterte Changing Course" *PRIF Reports* . p.2-15, dalam https://www.ssoar.info/ssoar/bitstream/handle/document/57889/ssoar-2018-kreuzer-Dealing_With_China_in_the.pdf?sequence=1&isAllowed=y&lnkname=ssoar-2018-kreuzer-Dealing_With_China_in_the.pdf (diakses pada: 6/2/2022. 08.27 WITA)
- Li, J. & Chen, P. (2016). "Joint Development in The Sout China Sea: Is The Time Ripe?" *Asian Yearbook of International Law*, Vol. 22, p.132-133, dalam <https://brill.com/view/book/edcoll/9789004379633/BP000010.xml?body=pdf-43180> diakses pada: 10/3/2022. 16.28 WITA)

Lin, K. & Chuanyu, L. (2018). "China-Philippines Joint Development of South China Sea Hydrocarbon Resources: Challenges and Future Priorities" China International Studies dalam <http://ciisjournal.com/Admin/UploadFile/Issue/toqgzxse.pdf> (diakses pada: 14/2/2022 13.22 WITA)

Nugroho, MAA. & Hikam, MM. (2020). "South China Sea Claim Dispute Settlement Between ASEAN and China" Trunojoyo Law Review, Vol. 2, No.1 dalam <https://journal.trunojoyo.ac.id/trunojoyo-law-review/article/download/9478/5346> (diakses pada: 15/2/2022. 07.02 WITA)

Qi, H. (2019). "Joint Development in the South China Sea: China's Incentives and Policy Choices" Journal of Contemporary East Asia Studies, Vol. 8, No. 2 p. 226 dalam <https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/24761028.2019.1685427> (diakses pada: 14/2/2022. 17.07 WITA)

Sulistiyani, E. & Nugroho, A. (2016) "Penyelesaian Sengketa Batas Landas Kontinen Di Laut China Selatan Antara China Dengan Filipina, Vietnam, Malaysia Dan Brunei Darussalam" Novum: Jurnal Hukum, Vol. 3, No. 4, p. 2-9, dalam <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/18535> (diakses pada: 25/3/2022. 09.10 WITA)

Teixera, V. (2019) "The United States' China Containment Strategy and the South China Sea Dispute" Central European Journal of International and Security Studies, Vol. 13, No.3 dalam https://www.cejiss.org/images/issue_articles/2019-volume-13-issue-3/08-teixera.pdf (diakses pada: 15/2/2022. 12.55 WITA)

Zhou, W. "China's Growing Assertiveness in the South China Sea" Real Institute Elcano, dalam <https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/chinas-growing-assertiveness-in-the-south-china-sea/> diakses pada 20 Februari 2022. (diakses pada: 15/2/2022. 12.55 WITA)

Artikel Daring

"Analyst Suspects China Pressure as Philippines Suspends Oil Exploration," (2021). Radio Free Asia, dalam <https://www.rfa.org/english/news/china/philippines-southchinasea-04212022134327.html> (diakses pada: 12/3/2022. 07.15 WITA)

"China's Development to Remain Peaceful: Xi" (2011) dalam http://in.china-embassy.gov.cn/eng/zt/peaceful/201301/t20130130_2377105.htm (diakses pada: 3/7/2022. 08.11 WITA)

“China’s Maritime Disputes” Council on Foreign Relation (2022) dalam <https://www.cfr.org/timeline/chinas-maritime-disputes> (diakses pada: 20/2/2022. 13.05 WITA)

“China’s Peaceful Development on White Paper” (2011) dalam http://in.china-embassy.gov.cn/eng/zt/peaceful/201109/t20110906_2377093.htm (diakses pada:3/7/2022. 09.03 WITA)

Reed, D. “In Pursuit of Prosperity: South China Sea Chapter Summary” dalam <http://www.worldwildlife.org/publications/in-pursuit-of-prosperity-south-china-sea-chapter-summary>. (diakses pada:20/2/2022. 16.26 WITA)

Wong, E. “Xi Again Defends China’s Claim to South China Sea Island” The New York Times, dalam <https://www.nytimes.com/2015/11/08/world/asia/xi-jinping-china-south-china-sea-singapore.html> (diakses pada:10/2/2022. 08.47 WITA)

Skripsi

Aulia, IW. (2020) “Alasan China berupaya Menyelesaikan Konflik Laut China Selatan Melalui Pendekatan Diplomasi Bilateral”. Skripsi. (Universitas Muhammadiyah Malang) p. 67, dalam <https://eprints.umm.ac.id/70210/>

Fatmasiwi, LN. (2018). “Community of Common Destiny sebagai Platform Kebijakan Luar Negeri China dalam Proyek One Belt and One Road (OBOR)”. Skripsi. (Yogyakarta. Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMY) p. 3, dalam <http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/18791>

LAMPIRAN

Naspub 1 : Analisis Pendekatan Bilateral Consultative Mechanism Sebagai Jalan Damai China dalam Meredam Konflik Dengan Filipina di Laut China Selatan

by Niken Putri Latifah

Submission date: 11-Oct-2022 04:13PM (UTC+0800)

Submission ID: 1922404739

File name: Naspub_Turnitin_Niken_Putri_Latifah.docx (57.4K)

Word count: 4975

Character count: 32604

Naspub 1 : Analisis Pendekatan Bilateral Consultative Mechanism Sebagai Jalan Damai China dalam Meredam Konflik Dengan Filipina di Laut China Selatan

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

11%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

3%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

2%

2

[medium.com](https://www.medium.com)

Internet Source

1%

3

Muhar Junef. "Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018

Publication

1%

4

indonesiansoldiers.blogspot.com

Internet Source

<1%

5

www.slideshare.net

Internet Source

<1%

6

maritimnews.com

Internet Source

<1%

7

ebin.pub

Internet Source

<1%